

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era sekarang ini perkembangan teknologi yang sangat cepat dan mengalami perubahan yang sangat pesat. Mengharuskan kita mengikuti perkembangan tersebut dan melupakan kebiasaan lama yang dapat menghambatnya. Dengan adanya perkembangan teknologi dapat mempermudah pekerjaan dan dapat mempersingkat waktu dalam pengerjaannya. Maka dari itu inovasi sangatlah diperlukan di berbagai bidang. Salah satunya bidang penyaluran bantuan untuk masyarakat, yang mengalami inovasi yang menjadi bantuan pangan non-tunai. Supaya bantuan yang diberikan oleh pemerintah tepat pada sasaran yang diinginkan. Inovasi merupakan ide kreatif yang bila penerapannya tepat akan menghasilkan program yang baik seperti program E-warong.

Menurut (Handrisal, 2021) Inovasi merupakan salah satu hal yang harus selalu dilakukan untuk mengembangkan organisasi menjadi lebih baik, tidak terkecuali pada organisasi non profit seperti pemerintah. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyaluran bantuan yang dahulunya dilakukan secara tunai menjadi non tunai. Sedangkan menurut (Siregar, 2019) mengemukakan bahwa Program yang telah dilakukan oleh Pemerintah sebagai upaya mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan membuat program-program untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seperti Pemberian Bantuan Kesehatan (Jamkes-mas) 2005, Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2006, Jaminan Kesehatan (Askes-mas). kin) 2006, Bantuan Beras untuk

Masyarakat Miskin (RASKIN) 2007, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 2007, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), 2007, Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2007, dan Program Keluarga Harapan (PKH) 2007.

Salah satu program penanggulangan kemiskinan pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat yang saat ini dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH), guna terlaksananya percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus mengembangkan kebijakan dibidang perlindungan sosial. Program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan ternyata belum mampu secara signifikan mengurangi jumlah penduduk miskin, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang penyebab banyaknya program penanggulangan kemiskinan yang tidak efektif. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan, agar kesejahteraan masyarakat miskin dapat tercapai.

Dalam mengkoordinasikan percepatan penanggulangan kemiskinan, Presiden Joko Widodo memberikan arahan tentang mekanisme bantuan sosial nontunai terkait perluasan inklusi keuangan pada April 2016. Sejalan dengan arahan presiden, Kementerian Sosial menciptakan kemiskinan yang sinergis. program pengentasan agar hasilnya berdampak luas, efisien dan efektif. Program yang dibuat oleh Kementerian Sosial yaitu penyaluran bansos nontunai yang disebut E-Warong KUBE-PKH. Program e-Warong pertama yang diresmikan di Kota Malang merupakan program pengentasan kemiskinan yang disinergikan, sehingga selanjutnya dapat berdampak luas, efisien dan efektif. Program ini merupakan transfer bansos tunai ke bansos nontunai berbasis teknologi.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas bantuan sosial dan memperluas cakupan layanan keuangan inklusif, sehingga mampu memberdayakan masyarakat sebagai pelaku pro Program e-Warong KUBE-PKH merupakan metode yang digunakan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang “Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Warung Elektronik Kelompok Usaha Bersama Gotong Royong”. Program ini merupakan tindak lanjut dari upaya pengentasan kemiskinan melalui sinergi Program Keluarga Harapan (PKH) dengan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Program e-Warong ini merupakan hasil kerjasama Kementerian Sosial (Kemensos) dengan bank pelaksana (BNI dan BRI), Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), dan Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS) untuk non-penyyaluran bantuan sosial PKH tunai. Untuk mengakses bantuan tersebut, keluarga penerima manfaat yang selanjutnya disebut KPM memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai sarana untuk menyalurkan bantuan.

Program e-Warong KUBE-PKH yang telah dicanangkan Kemensos akan menjadi agen pembayaran keuangan sekaligus perpanjangan tangan bank dan penyedia sembako bekerja sama dengan Perusahaan Umum (Perum Bulog) bagi penerima manfaat program bantuan pangan, agar KPM tidak lagi menjadi penonton. dalam bantuan sosial, tetapi berperan aktif dalam pengelolaan bantuan sosial itu sendiri.

Selain itu, ide pendirian e-Warong KUBE-PKH juga berawal dari pemberdayaan masyarakat yang sudah terbentuk yaitu Kelompok Usaha Bersama atau sering disebut KUBE. E-Warong KUBE-PKH merupakan warung makan biasa namun dalam proses transaksi yang berbeda yaitu dalam bentuk non tunai atau elektronik yang bertujuan agar bantuan yang diterima masyarakat tepat sasaran, meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengembangkan usaha, dan sebagai sarana untuk memasarkan produk-produk masyarakat sekitar, khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

(Siregar, 2019) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan program e-Warong masih terdapat berbagai permasalahan seperti belum memadainya bangunan e-Warong yang telah berdiri karena keterbatasan waktu dan keterlambatan pencairan dana, serta permasalahan terkait sumber daya manusia (SDM). Dimana para asisten dan pengurus e-Warong masih sangat membutuhkan pendampingan berupa pelatihan-pelatihan yang dapat menambah pemahaman dan pengetahuan khususnya dalam pengelolaan e-Warong.

secara konseptual, inovasi dapat dijelaskan karena transformasi pengetahuan dalam produk, pendekatan, dan layanan baru, tindakan penggunaan sesuatu yang baru. Tujuan yang terutama didasarkan sepenuhnya pada penemuan itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas
2. Mengurangi biaya
3. Menciptakan pasar baru

4. Memperluas jangkauan produk
5. Menganti produk/layanan
6. Mengurangi konsumsi kekuatan

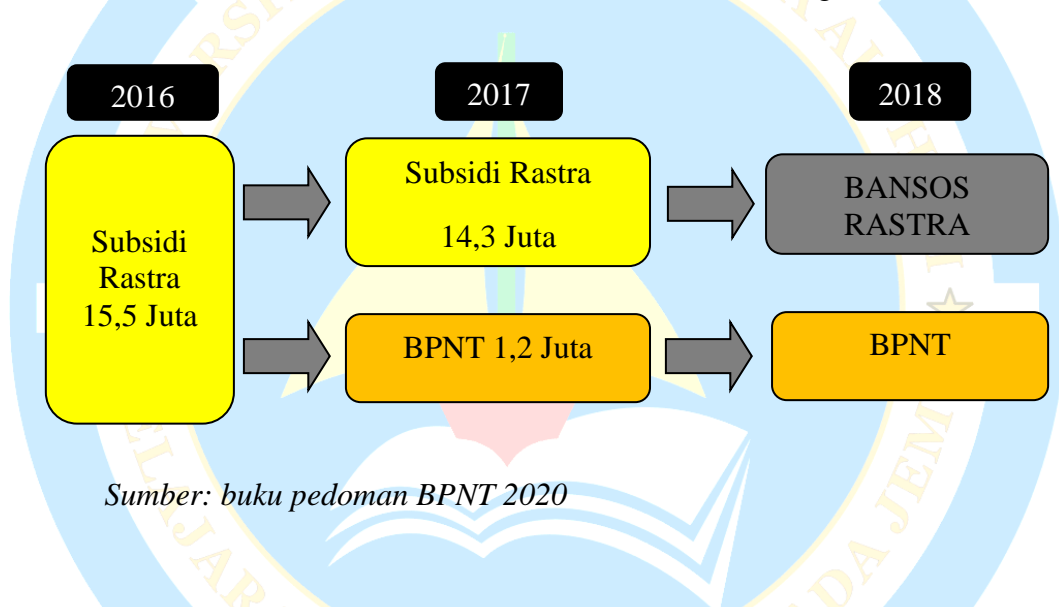
Dalam bantuan tunai keluarga penerima manfaat langsung mendapatkan uang tunai. Yang mana uang tersebut harus dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Namun dalam pelaksanaannya banyak di temukan kelebihan dan kekurangannya. Program pemerintah tersebut dirasa kurang efektif, Dalam hal memberikan bantuan tunai kepada orang miskin, tentu ada persyaratan atau kriteria yang unik.

Sifatnya paling efektif membantu memenuhi keinginan sehari-hari, namun keluarga penerima memanfaatkannya untuk hal-hal yang dianggap kurang penting. Seperti halnya tukang becak, biasanya uang yang diperoleh dari bantuan tunai atau langsung digunakan untuk berbelanja rokok. Dan beberapa digunakan untuk berbelanja pakaian atau sepatu. dasarnya digunakan untuk keinginan yang dapat dianggap kurang penting untuk keinginannya. Selain disalahgunakan, keabsahan statistik negatif juga diragukan karena berdampak pada keakuratan penyerahan uang tunai kepada warga yang berhak. Seringkali statistik data untuk kebutuhan persyaratan penerima bantuan tersebut dipalsukan, sehingga seakan berdampak dalam ketepatan pemberian dana bantuan tunai pada warga yang berhak. Mungkin orang lain yang benar-benar membutuhkan malah tidak mendapatkannya malahan orang yang dianggap mampu mendapatkannya.

Oleh karenanya pemerintah mencari solusi dalam penyaluran program bantuan sosial tersebut. Pada pertengahan tahun 2016 pemerintah meluncurkan

program Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (e-Warong Kube-PKH) dalam skala perintisan. Menurut (Mawardi, 2017) program tersebut merupakan pengalihan program bantuan sosial tunai ke program bantuan sosial non-tunai berbasis digital. berdasarkan program tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas bantuan sosial dan memperluas cakupan pelayanan keuangan inklusif.

Gambar 1.1 Transformasi Bantuan Sosial Pangan



Sumber: buku pedoman BPNT 2020

Bantuan rastra merupakan bantuan yang diberikan dalam bentuk beras berkualitas medium sejumlah 10 Kg per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan dan KPM penerima bansos rastra tidak dikenakan harga atau biaya tebusan. Sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) setiap KPM mendapat Rp110.000 per bulannya. Uang tersebut tidak dapat diambil dengan secara tunai atau dalam bentuk uang dan paling mudah ditukar dengan beras atau telur sesuai keinginan.

Sumber daya dapat disimpan di dalam akun sumber daya makanan untuk digunakan sekali lagi lebih awal dari distribusi bulan berikutnya .

Pada tahun 2020, pihak berwenang Indonesia telah memutuskan untuk melanjutkan BPNT karena Program Sembako, dapat menggantikan minimal 2 hal: (1) kuantitas sumber daya yang bermanfaat ditingkatkan menjadi Rp. 200.000, atau tumbuh sekitar 100% dari sebelumnya Rp. 110.000; dan (2) masuknya berbagai komoditas selain beras dan telur, karena itu diversifikasi bahan pangannya untuk dapat dipasok dan didistribusikan. Sebelum penetapan tersebut berubah menjadi berlaku, pada Juli 2019, Menteri Sosial melalui Surat Edaran Nomor 01/MS/K/07/2019 sebelumnya telah memutuskan pelaksanaan Program BPNT di seluruh kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dan keterlibatan BULOG dalam penyediaan komoditas beras BPNT mulai September 2019.

Tabel 1. 1 Kelembagaan Tikor Bansos Pangan

Pusat	Tim koordinasi bansos pangan tingkat pusat	Dibentuk dan dikoordinasikan oleh Menko PKM
Provinsi	Tim koordinasi bansos pangan tingkat provinsi	Dibentuk dan dikoordinasikan oleh Gubernur
Kabupaten/Kota	Tim koordinasi bansos pangan tingkat kabupaten/kota	Dibentuk dan dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota
Kecamatan	Tim koordinasi bansos pangan tingkat Kecamatan	Dibentuk dan dikoordinasikan oleh Camat

Sumber: Buku Pedoman BPNT 2020

Masing-masing bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program di wilayahnya. Tim koordinasi bansos pangan provinsi dan kabupaten/kota:

- a. Ketua: Sekertaris Daerah
- b. Sekertaris: Kepala Dinas Sosial

Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah dalam penyaluran bantuan sosial non tunai melalui program elektronik warung (e-warung). Dimana program penyaluran bantuan tersebut merupakan program yang dibuat oleh pemerintah yang berguna untuk penyaluran bantuan sosial non-tunai yang bekerja sama dengan berbagai pihak.

Menurut (Pathony, 2019) menetapkan bahwa E-warung adalah fasilitas perusahaan dalam penyaluran bantuan sosial berupa sembako dan/atau uang tunai secara elektronik dan merupakan metode pembayaran yang dilakukan secara elektronik /non-tunai, sehingga memudahkan untuk dapatkan bantuan program bantuan pangan non-tunai. Dibawah ini merupakan data yang diperoleh peneliti dari Dinas Sosial Kota Tanjungpinang. Yang mana di Kota Tanjungpinang terdapat empat Kecamatan. Di masing-masing Kecamatan memiliki jumlah yang berbeda-beda penerima Program Bantuan Pangan Non-Tunai yang sering disebut KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Data dari setiap Kecamatan di kota Tanjungpinang sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Data Penerima BPNT Tahun 2020 di Kota Tanjungpinang

Kecamatan	Penerima BPNT
Tanjungpinang Kota	1578
Bukit Bestari	2123
Tanjungpinang Barat	2101
Tanjung pinang timur	3357
Jumlah	9159

Sumber: Dinas Sosial Kota Tanjungpinang 2022

Tabel 1. 3 Data Penerima BPNT Tahun 2021 di Kota Tanjungpinang

Kecamatan	Penerima BPNT
Tanjungpinang Kota	1337
Bukit Bestari	1720
Tanjungpinang Barat	1657
Tanjung pinang timur	2816
Jumlah	7530

Sumber: Dinas Sosial Kota Tanjungpinang 2022

Menutip dari buku pedoman umum Bantuan Pangan Non-Tunai yang di tulis oleh (Belanawane, 2020) pengertian dari Bantuan Pangan Non Tunai BPNT adalah bantuan pangan yang akan disalurkan dalam bentuk tidak tunai (barang) yang diberikan oleh pemerintah untuk Keluarga Penerima Manfaat (PKM) di setiap bulannya dengan mekanisme uang elektronik yang didapat dari kartu kombo dan hanya dapat digunakan untuk membeli makanan pokok di pedagang bahan pangan atau pokok yang disebut E-warong yang sudah bekerjasama dengan Bank penyalur. Sampai dengan saat ini tahun 2022 jumlah elektronik warong di Kota Tanjungpinang berjumlah 37 yang terdiri dari 12 E-Warong dan 25 Agen

yang bekerja sama dengan bank himbara yang tersebar di empat Kecamatan Kota Tanjungpinang. Sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Data E-Warong Kota Tanjungpinang 2022

No	Kelurahan	Jumlah E-Warong
1	Tanjungpinang Timur	11
2	Tanjungpinang Barat	8
3	Tanjungpinang Kota	6
4	Bukit Bestari	12
Jumlah		37

Sumber: Dinas Sosial Kota Tanjungpinang 2022

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Inovasi Penyaluran Program Bantuan Pangan Non-Tunai Melalui Program Elektronik Warong (E-Warong) Di Kota Tanjungpinang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana Inovasi Penyaluran Program Bantuan Pangan Non-Tunai Melalui Program Elektronik Warong(E-Warong) Di Kota Tanjungpinang Pada Tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran hasil yang ingin dicapai, digunakan sebagai acuan dalam pengumpulan data dan sebagai pembatasan dalam penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Inovasi penyaluran bantuan pangan non-tunai melalui program elektronik warong(e-warong) di kota Tanjungpinang Tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Kegunaan secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi bagi kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan penyaluran bantuan pangan non-tunai melalui program elektronik warong(e-warong) di kota Tanjungpinang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Kegunaan secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta referensi bagi dinas sosial kota Tanjungpinang dalam rangka memberikan Bantuan sosial kepada masyarakat.